

AWDI

Program Study Tour SMPN 1 Mirit Jadi Sorotan: Diduga Jadi Ajang Bisnis, Wali Murid Menjerit Beban Biaya

Agung widodo - KEBUMEN.AWDI.OR.ID

Jan 26, 2025 - 07:45



Foto: SMPN 1 Mirit, Kebumen, Jawa Tengah.

KEBUMEN- Program study tour yang diadakan SMPN 1 Mirit, Kebumen, Jawa Tengah, memicu kontroversi dan keluhan dari para wali murid. Dengan tujuan ke beberapa kota di Jawa Timur, kegiatan ini dinilai lebih condong ke arah hura-hura daripada mendukung pembelajaran siswa. Tak hanya itu, biaya yang dibebankan sebesar Rp900 ribu per siswa dianggap memberatkan, terutama bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah.

PA, salah satu wali murid, mengungkapkan bahwa ia terpaksa meminjam uang demi anaknya bisa mengikuti kegiatan tersebut. "Kenapa harus jauh-jauh ke Malang, Surabaya, dan Madura? Ongkosnya saja Rp900 ribu, belum lagi uang sakunya. Kami yang kurang mampu sangat terbebani. Rasanya seperti ini ajang bisnis pihak sekolah," keluh PA, Sabtu (25/1/2025).

Senada dengan PA, wali murid lainnya, YT, menyampaikan bahwa pembuatan karya ilmiah tidak harus dilakukan di luar daerah. "Siswa bisa membuat karya tulis tentang sejarah atau potensi lokal Kebumen. Biayanya lebih hemat dan pembelajaran tetap efektif," tegasnya.

Program study tour ini rencananya akan melibatkan sekitar 180 siswa kelas VIII dari total 250 siswa. Bagi siswa yang tidak ikut, pihak sekolah mengarahkan mereka untuk membuat karya tulis di Wisata Edukasi BRIN di Karangsembung dengan biaya Rp300 ribu per siswa.

Kepala Sekolah SMPN 1 Mirit, Tri Wahyuni, membenarkan kegiatan ini dan menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kebumen. Namun, saat diminta menunjukkan bukti surat izin, ia tidak dapat memberikan dokumen tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan lebih lanjut.

"Kami sudah bersurat ke dinas dan mendapatkan izin. Surat pemberitahuan juga sudah kami kirimkan ke Polsek. Tetapi file surat izin ada di dinas, sehingga tidak bisa kami tunjukkan di sini," jelas Tri Wahyuni.

Keluhan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Wali murid berharap Dinas Pendidikan segera meninjau ulang kegiatan semacam ini dan memastikan program sekolah tidak memberatkan orang tua. "Kami minta kegiatan seperti ini dihapuskan. Kalau ingin mendidik anak-anak, cukup fokus pada potensi lokal yang lebih relevan dan terjangkau," pinta YT.

Tingginya biaya program ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit menimbulkan desakan kepada pihak berwenang untuk memastikan agar pendidikan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

(SND/Redaksi)